

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang dikenal memiliki hubungan yang begitu erat selama beberapa dekade. Bermula sejak penandatanganan kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pada tahun 1990, Indonesia dan Tiongkok telah melakukan banyak kerja sama bilateral seperti penandatanganan kesepakatan pembentukan komisi bersama di bidang ekonomi, perdagangan dan kerja sama teknik di era Soeharto; peningkatan kerja sama melalui pembentukan forum energi sebagai payung investasi Tiongkok di Indonesia di era Megawati; terjalinnya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok pada tahun 2005 dan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok pada tahun 2013 di era SBY; serta kerja sama di berbagai sektor strategis seperti politik, keamanan, hingga ekonomi di era Joko Widodo (Taulu, 2022).

Kerja sama Indonesia-Tiongkok di era Joko Widodo pun menunjukkan hasil yang baik, pasalnya Tiongkok telah berkontribusi sebagai salah satu penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Tercatat, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai US\$33,39 Miliar, dengan Tiongkok sebagai negara kedua tertinggi dengan realisasi PMA sebesar US\$5,18 Miliar (Annur, 2023). Hingga pada tahun 2024, jumlah investasi PMA Tiongkok pun meningkat menjadi US\$8,1 Miliar dari US\$5,18 Miliar ke Indonesia (Wafa, 2025). Investasi tersebut cukup

beragam dan mencakup berbagai sektor strategis, termasuk manufaktur, infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Bahkan, sekarang terdapat setidaknya 20 ribu proyek perusahaan Tiongkok yang telah dibangun di Indonesia (Kumparan Bisnis, 2025).

Kerja sama kedua negara dianggap penting sebab bagi Indonesia, investasi merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan nasional selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap hanya sanggup menyediakan sekitar 30% dari total sumber dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dalam menopang aktivitas perekonomian di Indonesia (BPKP, 2017). Di saat yang bersamaan, Tiongkok juga berkomitmen dalam memperluas kerja samanya dengan negara lain dan bertekad untuk meningkatkan pertumbuhannya melalui reformasi komprehensif, pemanfaatan mekanisme pasar dengan lebih baik, dan mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi yang mencakup prioritas pada investasi teknologi maju (Yang, 2024).

Two Countries Twin Parks (TCTP) ialah program kerja sama strategis antara Indonesia dengan Tiongkok yang dirancang guna mensinergikan kekuatan industri dan mendorong pertumbuhan bersama (21st-Century Maritime Cooperation Committee, 2025). Proyek tersebut dianggap sebagai proyek prioritas nasional yang mempromosikan dan berada dibawah sinergi visi Poros Maritim Dunia Indonesia serta *Belt and Road Initiative* Tiongkok, sebagai upaya untuk mendorong percepatan perdagangan serta investasi kedua

negara melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang terintegrasi (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Inisiatif ini bermula sejak awal tahun 2021, tepatnya bulan Januari, ketika Kementerian Perdagangan Tiongkok, Pemerintah Provinsi Fujian, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait proyek *Two Countries Twin Parks*. Mekanisme TCTP memiliki kerangka model pembangunan bersama dengan penekanan pada kolaborasi perencanaan industri, investasi, serta pertukaran teknologi di kawasan industri masing-masing negara, yaitu *Yuanhong Investment Zone* di Fujian, Tiongkok, secara paralel Indonesia juga menyiapkan tiga kawasan industri guna mewujudkan proyek tersebut, yaitu Kawasan Industri Batang (sekarang disebut sebagai KEK Batang) di Jawa Tengah, Kawasan Industri Aviarna di Semarang, serta Kawasan *Bintan Industrial Estate* di Pulau Bintan (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Di Indonesia, KEK Batang dipilih karena lokasinya yang strategis di Jawa Tengah, yang menawarkan kedekatan dengan pelabuhan utama, jalan raya, serta jaringan kereta api yang meningkatkan daya tarik logistiknya untuk industri berorientasi ekspor. Bahkan, KEK Batang memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional (Grand Batang City, 2025). Di KEK Batang saja, TCTP diproyeksikan mampu menarik investasi hingga Rp60 triliun dan menciptakan lebih dari 10.000

lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia (Sukmawijaya & Ananda, 2025).

Sedangkan bagi Tiongkok, dalam perjalanan perkembangan hubungan antara kedua negara sejak masa lampau, Provinsi Fujian telah memainkan peran yang signifikan (Nugroho, 2025). *Yuanhong Investment Zone* di Fujian berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN (Yi & Meiqing, 2019).

Selain itu, kawasan tersebut mampu menarik lebih dari 620 perusahaan dengan total investasi sebesar 90,6 miliar yuan hingga tahun 2023, menjadikannya sebagai pusat industri yang potensial dan signifikan untuk sektor-sektor seperti pengolahan makanan, permesinan, dan layanan maritim (L. Yang & Juecheng, 2023). Posisi strategis tersebut memungkinkan kawasan Yuanhong bertindak sebagai mitra industri dan logistik Tiongkok yang mendorong integrasi ekonomi bilateral.

Sejak penandatanganan MoU pada tahun 2021, signifikansi proyek tersebut sudah terlihat, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Fujian, Guo Ningning bersama Duta Besar Djauhari Oratmangun dalam forum “*Indonesia-Tiongkok Two Countries Twin Parks (TCTP) Promotion Conference*” pada tahun 2022, disebutkan bahwa forum TCTP memegang peran yang krusial bagi penguatan hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok (Purba, 2022).

Inisiatif TCTP menandakan langkah yang baru dan suatu terobosan yang signifikan dalam hubungan kerja sama Indonesia-Tiongkok. Sebelumnya,

Indonesia belum pernah melakukan kerja sama dengan Tiongkok melalui skema *integrated industrial zone* (Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, 2023). Proyek ini memberikan harapan yang besar bagi Indonesia untuk dapat secara signifikan meningkatkan investasi serta mendorong pembangunan ekonomi di sekitar kawasan industri (Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, 2023).

Tidak hanya itu, Proyek TCTP menawarkan kesempatan yang unik dan berharga untuk meneliti bagaimana sebuah negara dapat melakukan *industrial leapfrogging* melalui kolaborasi bilateral yang terstruktur (Tiongkok Daily, 2023). Menurut Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Two Countries Twin Parks* Indonesia-Tiongkok diakui berpotensi menjadi *benchmark* untuk negara-negara lain di ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Di samping berbagai potensi yang ditawarkan oleh proyek ini, perlu untuk disadari bahwa skeptisme dan kritik terus menghantui proyek-proyek di bawah kerangka *Belt and Road Initiative*. BRI, sebagai proyek pembangunan infrastruktur global terbesar yang diluncurkan Tiongkok sejak 2013, menjanjikan peningkatan konektivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang (Wang et al., 2023). Namun, kekhawatiran banyak pihak akan *debt-trap* kerap mencuat (Liu, 2020). Kritik ini seringkali didasarkan pada perspektif realisme yang cenderung skeptis terhadap motif geopolitik Tiongkok (Gordon et al., 2020).

Sebelumnya, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok cenderung diwarnai dengan adanya dependensi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia bergantung pada teknologi Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Indonesia Tiongkok yang menonjolkan ketergantungan Indonesia akan teknologi Tiongkok (Zahro et al., 2024). Sedangkan meskipun masih terus dikembangkan, sejauh ini TCTP menunjukkan adanya pola interdependensi antara kedua negara contohnya dalam hal Tiongkok yang mengandalkan impor komoditas dari Indonesia untuk Taman Industrinya.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti kekhawatiran mengenai sifat asimetris dari hubungan ini. Misalnya, Tritto (2020) berpendapat bahwa modal negara Tiongkok di bawah BRI sering kali menghadapi kesulitan dengan "pertautan yang penuh konflik" di Indonesia, mengungkapkan pola keterlibatan yang diperdebatkan di mana investasi Tiongkok menghadapi ketidakpercayaan publik dan perlawanan institusional, mencerminkan hubungan yang tidak seimbang dan penuh ketegangan. Demikian juga, Liu dan Lim (2023) menunjukkan bahwa proyek skala besar, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menggambarkan ketergantungan struktural Indonesia pada pembiayaan dan teknologi Tiongkok, yang lebih dibatasi oleh gesekan regulasi dan tantangan pelaksanaan lokal.

Studi-studi ini umumnya menekankan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok cenderung tidak seimbang, dengan Indonesia lebih berposisi hanya sebagai penerima modal dan keahlian Tiongkok. Dengan

memeriksa peran strategis Indonesia yang semakin besar dalam menyediakan komoditas penting, seperti kelapa untuk pemrosesan industri di Zona Investasi Yuanhong Tiongkok, dan memposisikan pusat industri seperti KIT Batang sebagai bagian dari rantai pasokan regional, studi ini menyoroti pola ketergantungan timbal balik yang muncul yang menandakan transisi dari ketergantungan menjadi hubungan bilateral yang lebih seimbang dan saling bergantung.

Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana pola hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok yang selama ini cenderung tidak seimbang antara satu sama lain mulai mengalami pergeseran serta penguatan ke arah interdependensi, terutama dalam konteks setelah adanya proyek TCTP yang tentunya memberikan implikasi positif bagi hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini untuk dijadikan panduan utama dalam proses analisis dan pembahasan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu **“Bagaimana implikasi proyek kerja sama *Two Countries Twin Parks* (TCTP) terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni tujuan yang sifatnya umum serta khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini disusun guna menganalisis perkembangan proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dalam kerangka kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok, meliputi kawasan industri terpadu yang terletak di Indonesia (KEK Batang, Aviarna, Bintan) dan *Yuanhong Investment Zone* (Tiongkok), kemudian melihat adanya interdependensi dan mengkaji implikasinya terhadap hubungan bilateral kedua negara.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan serta langkah-langkah yang telah diambil dalam proyek kerja sama TCTP di Indonesia serta di *Yuanhong Investment Zone* di Provinsi Fujian, Tiongkok.
2. Memperoleh gambaran perkembangan realisasi proyek *Two Countries Twin Parks* berdasarkan data investasi, kebijakan, nota kesepahaman (MoU), serta kerja sama yang telah terbangun.
3. Mengidentifikasi dampak dari proyek *Two Countries Twin Parks* terhadap hubungan bilateral Indonesia - Tiongkok, terutama pada aspek ekonomi maupun politik serta diplomatik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kajian kerja sama internasional, khususnya dalam konteks proyek kerja sama bilateral antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Tiongkok). Selain itu hasil dari penelitian ini juga berguna untuk memperkaya literatur tentang *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia, khususnya terkait proyek *Two Countries Twin Parks* yang masih terbatas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam konteks praktis, penelitian ini dimaksudkan guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan di Indonesia maupun Tiongkok dalam merumuskan strategi sekaligus kebijakan yang lebih optimal serta efisien terkait kerja sama bilateral serta investasi asing.

Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai proyek TCTP serta dampaknya terhadap perekonomian hingga hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, kemudian memberi wawasan terkait pentingnya kerja sama internasional sekaligus memberikan informasi mengenai kerja sama kedua negara dalam skema TCTP yang nantinya dapat mengurangi mispersepsi dan skeptisme terhadap proyek berbasis *Belt and Road Initiative*.

1.5 Literature Review

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Lovina, JiaJia & Chen, 2017) dengan judul ***“Review of “The Chinese Belt and Road Initiative”: Indonesia-Tiongkok Cooperation and Future Opportunities for Indonesia’s Port Cities Development”*** mengungkapkan bahwa kerja sama pembangunan kota pelabuhan di bawah skema BRI dinilai positif dan menjadi kesempatan yang menguntungkan Indonesia, melalui analisis SWOT. Lebih lanjut, (Lovina, JiaJia & Chen, 2017) berargumen bahwa kota dengan pelabuhan memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kota yang tidak memiliki pelabuhan, maka dari itu dengan terealisasinya BRI dan Tol Laut, akan dilaksanakan pembangunan pelabuhan yang lebih banyak yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi pada wilayah pelabuhan di Indonesia. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian lainnya oleh (Chaoqun et al., 2023) dalam artikel jurnalnya yang berjudul ***“Tiongkok-Malaysia Relations and The Belt and Road Initiative”***, yang memandang inisiatif BRI dengan sangat positif, inisiatif ini dipandang sebagai faktor kunci yang telah meningkatkan kerja sama persahabatan antara Tiongkok dan Malaysia. Dalam skema BRI proyek-proyek seperti pengembangan pelabuhan, pembangunan kereta api, kolaborasi pendidikan juga proyek TCTP dibahas pada jurnal yang berpengaruh baik bagi hubungan bilateral Tiongkok dan Malaysia (Wang et al., 2023). Kemudian, pernyataan tersebut juga turut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Fauziyyah et al., 2024) yang berjudul ***“Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) Dalam Pembangunan***

Infrastruktur di Indonesia Tahun 2019-2023”, dijelaskan bahwa eksistensi BRI antara Indonesia serta Tiongkok membawa dampak positif bagi kedua pihak, dengan penggunaan teori Liberalisme Interdependensi dan konsep kepentingan nasional. Kemitraan BRI yang terjalin di antara keduanya berlandaskan pada kepentingan Tiongkok dalam melebarkan dan mengukuhkan jalur sutra di Asia Tenggara serta kepentingan Indonesia dalam pemenuhan dana bagi pembangunan berbagai infrastruktur khususnya Jakarta-Bandung *high-speed train* yang nantinya akan berpengaruh pada kenaikan ekonomi bagi Indonesia sendiri. Serta teori liberalisme interdependensi yang menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Tiongkok ketergantungan satu sama lain dalam mencapai kepentingan masing-masing pihak (Fauziyyah et al., 2024).

Meskipun ketiga literatur tersebut memberikan analisis yang positif terhadap BRI, fokusnya masih bersifat umum, hanya sekilas atau beberapa proyek sekaligus, serta belum menggali proyek kerja sama spesifik yaitu *Two Countries Twin Parks* (TCTP). Disisi lain, penelitian ini akan menghadirkan fokus yang berbeda dengan mengkaji BRI melalui studi kasus spesifik TCTP yang belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan neoliberalisme untuk melihat kerja sama ini sebagai hubungan yang kental akan interdependensi serta mampu menguatkan hubungan bilateral, tidak semata didorong oleh kepentingan geopolitik atau relasi saja. Berbeda dari kecenderungan studi sebelumnya yang membahas BRI secara umum atau hanya fokus pada proyek-proyek besar, penelitian ini menyoroti

aspek timbal balik dalam TCTP dan bagaimana Indonesia turut berperan aktif dalam merancang kerja sama, bukan hanya sebagai penerima pasif.

Literatur lain memiliki pandangan yang berbeda, jurnal berjudul **“Ancaman Asimetris dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative* di Indonesia”** yang ditulis oleh (Palamani, 2022) yang berargumen bahwa BRI memiliki ancaman asimetris terhadap Indonesia yang berdampak pada sektor ekonomi dan pertahanan. Dengan teori strategi, ancaman dan Neo-Imperialisme penulis mengidentifikasi bahwa pada sektor pertahanan, ancamannya berupa klaim Tiongkok pada Natuna Utara juga isu TKA Tiongkok yang tidak memiliki izin kerja. Sedangkan ancaman sektor ekonomi yaitu jika *debt-trap* tidak terhindarkan maka klaim atas SDA juga infrastruktur merupakan ancaman besar (Palamani, 2022). Selaras dengan literatur berjudul **“Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping”** yang ditulis oleh (Anam & Risyanti, 2018) berargumen bahwa BRI dilandasi oleh ambisi Tiongkok dalam memenuhi kepentingannya dan meningkatkan pengaruhnya di Asia. Dengan teori Neorealis penulis berpendapat bahwa pertama, BRI dilandasi oleh kepentingan Tiongkok dalam mengamankan jalur pasok energinya. Kedua, perebutan *power* dengan Jepang di Asia dalam pendanaan *high speed railway*. Ketiga, hegemoni dominasi AS khususnya di Asia (Anam & Ristiyani, 2018). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Zahro et al., 2024) yang berjudul **Analisis Hubungan Politik Utang Indonesia dan Tiongkok untuk Menghindari Debt Trap Diplomacy**, menjelaskan bahwa pinjaman dari Tiongkok dapat

menimbulkan adanya dependensi. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa dalam proyek yang berkaitan dengan BRI sebelumnya, Tiongkok memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Hal ini kemudian direspons oleh Indonesia dengan upaya diplomasi untuk menegosiasikan ulang bunga serta tenor pinjaman juga dilakukan.

Ketiga literatur menunjukkan kecenderungan pandangan skeptis terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan melihat BRI sebagai ancaman asimetris juga menilai BRI sebagai strategi hegemoni Tiongkok yang lebih mementingkan pengaruh geopolitik dibandingkan kerja sama. Di sisi lain, penulis mengusung pendekatan yang berbeda dengan mengkaji implikasi proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dibawah BRI melalui perspektif neoliberalisme. Penelitian ini memandang kerja sama tersebut sebagai bentuk interdependensi positif yang mampu memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Berbeda dengan literatur sebelumnya yang membahas BRI secara umum dan dari sudut pandang Neorealis dan Neo-Imperialisme, penelitian ini menitikberatkan pada proyek spesifik yaitu TCTP. Penggunaan pendekatan neoliberalisme pada penelitian ini juga menawarkan perspektif yang lebih seimbang, mengingat kedua literatur ini lebih cenderung skeptis atau berfokus pada dimensi politik dan keamanan dalam proyek BRI.

Selain itu pada literatur lain seperti ***“Chinese Investments in Industrial Parks: Indonesia and Malaysia Compared”*** yang ditulis oleh (Yean & Negara, 2020), berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalam pendekatan Indonesia dan Malaysia dalam menarik investasi Tiongkok pada *Industrial*

parks. Di Indonesia, iklim investasi yang berubah mendorong percepatan perizinan, peningkatan insentif, dan dukungan bagi proyek besar di daerah kurang berkembang. Sementara di Malaysia, fokus utamanya adalah pelonggaran birokrasi, pembebasan pajak dan bea, serta penguatan infrastruktur regional untuk mendukung pertumbuhan industri (Yean & Negara, 2020). Juga literatur lain yang serupa berjudul “**Analisis Kerja sama Two Countries Twin Parks Indonesia-Tiongkok**” yang ditulis oleh (Munawaroh, 2024) melihat proyek TCTP berpotensi mendorong terbentuknya kawasan industri modern dan zona teknologi melalui kerja sama kedua pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas riset, serta penguatan layanan logistik dengan melibatkan *Transfer of Technology* dari Tiongkok ke Indonesia (Munawaroh, 2024).

Secara khusus, keberhasilan Malaysia dalam mengimplementasikan *Twin Industrial Parks* dengan Tiongkok yang dinilai cukup berhasil memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yang menjadi acuan penting dalam mengidentifikasi potensi keberhasilan TCTP di Indonesia. Namun demikian, meskipun kedua literatur tersebut mengungkapkan dampak positif dari proyek TCTP, belum ada analisis yang mendalam mengenai implikasi proyek TCTP terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu dari perspektif neoliberalisme.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoretis

Dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, peneliti membutuhkan suatu kerangka teori yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memetakan fenomena berdasarkan teori yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan dan konsep dari teori neoliberalisme.

1.6.1 Teori Neoliberalisme

Selama ini, narasi mengenai BRI beserta proyek-proyek di bawah naungannya kebanyakan melihat dari sudut pandang yang cenderung skeptis dan pesimis. Kemudian, berbagai penelitian terdahulu mengenai BRI berskala makro, sehingga belum terdapat banyak penelitian mengenai proyek di bawah naungan BRI seperti TCTP di skala mikro. Mengacu pada kedua hal tersebut, teori neoliberalisme relevan untuk digunakan. Fokus utama dalam teori neoliberalisme adalah penekanan pada bagaimana kerja sama antar negara dan aktor non negara dapat tercapai dalam tatanan global. Terjalannya kerja sama antarbangsa bergantung pada kemampuan negara dalam menyesuaikan perilaku dengan preferensi aktualnya, sehingga kebijakan pemerintah dianggap oleh mitranya sebagai sesuatu yang dapat memfasilitasi realisasi dari tujuan mereka (Folker, 2013). Rae menegaskan bahwa dalam neoliberalisme, negara tidak hanya beroperasi dalam hal menolong dirinya sendiri, melainkan juga dapat bertindak secara kooperatif untuk keuntungan bersama (Rae, 2007). Secara umum, neoliberalisme juga dipahami sebagai ideologi ekonomi dan politik yang mendukung pasar bebas (*free trade*), deregulasi

modal (*deregulation of capital*), dan privatisasi (*privatization*) aset dan layanan negara (Mexhuani, 2025).

Menurut Baldwin (1993), neoliberalisme percaya bahwa kerja sama internasional merupakan solusi utama dalam sistem anarki internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik neoliberalisme, yaitu ambisi untuk mengokohkan serta memperluas cakupan pasar melalui peningkatan volume, intensitas, repetisi, serta pengaturan formal transaksi (Parmitasari & Alwi, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, yaitu (i) demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, (ii) Mendorong efisiensi operasional guna mereduksi pengeluaran, (iii) Munculnya kendala yang berpotensi mengguncang stabilitas keamanan kolektif, dan (iv) guna meminimalisir konsekuensi negatif yang timbul sebagai akibat dari langkah sepihak suatu negara yang memengaruhi negara lain (Holsti, 1995). Dari beragam faktor yang turut melatarbelakangi kerja sama internasional terjadi, peningkatan ekonomi, menjaga stabilitas dari ancaman keamanan, dan menjaga hubungan bilateral adalah prioritas dari lahirnya kerja sama internasional (*international cooperation*).

Keunggulan utama dari teori neoliberalisme terletak pada penekanannya terhadap interdependensi kompleks yang memungkinkan negara-negara secara bersama-sama mengejar keuntungan absolut (*absolute gains*). Hal ini sangat relevan dengan proyek TCTP yang

merupakan bentuk kerja sama ekonomi bilateral yang saling menguntungkan, di mana kedua negara berupaya memperkuat konektivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri terpadu. (Baylis et al., 2017). Dalam konteks ini, neoliberalisme menekankan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional sempit, tetapi juga pada keuntungan bersama yang dapat dicapai melalui mekanisme kerja sama dan institusionalisasi hubungan bilateral (Keohane, 1984).

Selain itu, neoliberalisme mengakui bahwa entitas non-negara layaknya korporasi multinasional, organisasi lintas negara, serta pasar global memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan antarnegara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika proyek TCTP yang melibatkan berbagai aktor dan institusi dalam pengelolaan investasi, teknologi, dan perdagangan (Dugis, 2016). Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana proyek TCTP Indonesia-Tiongkok dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara secara berkelanjutan.

Lebih jauh, neoliberalisme menekankan bahwa kerja sama internasional dapat mengurangi adanya ketidakpastian serta meningkatkan *mutual trust* antarnegara melalui peraturan yang disepakati bersama. Hal ini tentu penting dalam konteks TCTP yang memerlukan koordinasi serta komitmen jangka panjang agar proyek berjalan secara

efektif sekaligus mampu menghadirkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat (Keohane & Nye, 1977).

Salah satu konsep dalam neoliberalisme yang relevan dalam melihat bagaimana hubungan antara satu aktor dengan aktor hubungan internasional lainnya adalah neoliberalisme interdependensi. Neoliberalisme interdependensi dapat dipahami sebagai suatu situasi internasional yang saling bergantung, yang mana setiap aktor saling bergantung secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar aktor ini bersifat kooperatif sehingga kebijakan salah satu aktor berdampak terhadap aktor lainnya dan dilakukan dengan dasar kepentingan bersama. Dalam neoliberalisme, negara dipandang sebagai aktor rasional yang memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerja sama (Dugis, 2016; Keohane & Nye, 1977).

Oleh karena itu, penerapan teori neoliberalisme dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih peka akan adanya pola interdependensi sebagai implikasi dari proyek *Two Countries Twin Parks* terhadap hubungan bilateral Indonesia Tiongkok. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana interdependensi ekonomi dan kerja sama dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mempererat hubungan kedua negara di tengah dinamika global yang kian kompleks.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

Peneliti menetapkan definisi konseptual sebagai pemahaman yang digunakan untuk kemudian diteliti lebih lanjut, yang bersumber dari jurnal, buku, serta sumber-sumber yang relevan sebagai rujukan peneliti untuk dioperasionalkan dalam penelitian (Sinambela & Sinambela, 2022). Dalam penelitian ini, definisi konseptual bertujuan untuk menggambarkan konsep yang digunakan oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan permasalahan yang diteliti agar lebih terarah.

1.7.1.1 Kerja Sama Bilateral

Berdasarkan (Candra, 2020), Kerja sama bilateral mengacu pada kemitraan antara dua negara yang terjalin dalam ranah diplomasi, perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan, dengan penekanan khusus pada hubungan ekonomi antar keduanya.

1.7.1.2 Hubungan Bilateral

Berdasarkan (Perwita, 2005) hubungan bilateral yakni situasi yang menandai terdapatnya hubungan interdependen berupa pengaruh secara dua arah atau terjadinya hubungan timbal balik antara kedua pihak.

1.7.1.3 Interdependensi

Interdependensi dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang menggambarkan kondisi negara sebagai suatu entitas memiliki hubungan saling ketergantungan dengan aktor hubungan

internasional lain. Hubungan saling ketergantungan ini dapat membentuk suatu kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan antar aktor (Dugis, 2016).

1.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada proses pengukuran variabel penelitian yang diamati dengan mengacu pada ciri spesifik yang tercermin melalui dimensi atau indikator variabel penelitian (Widodo, 2019). Pada studi ini, definisi operasional bertujuan untuk menggambarkan operasionalisasi dari konsep yang digunakan ke dalam permasalahan yang diteliti, agar dapat diukur secara sistematis dan empiris.

Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme sebagai kerangka analisis untuk memahami implikasi dari proyek kerja sama *Two Countries Twin Parks* (TCTP) terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Neoliberalisme menekankan pentingnya institusi, interdependensi ekonomi, dan kerja sama internasional sebagai sarana untuk mencapai keuntungan bersama dan stabilitas dalam hubungan antar negara (Keohane & Nye, 1977; Baylis et al., 2017). Dengan demikian, konsep kerja sama internasional dalam konteks TCTP dipahami sebagai interaksi yang saling menguntungkan dan memperkuat ketergantungan positif antara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam penelitian ini didefinisikan sebagai interaksi dinamis antara Indonesia-Tiongkok yang ditandai dengan saling ketergantungan dan kerja sama dalam berbagai bidang, terutama dalam

konteks ini adalah ekonomi dan investasi (Munawaroh, 2024). Interdependensi muncul dari kebutuhan kedua negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing melalui integrasi kawasan industri, perdagangan, serta investasi yang difasilitasi oleh proyek *Two Countries Twin Parks*. Kawasan industri yang dimaksud mencakup *Yuanhong Investment Zone* di Fujian, Tiongkok dan 3 kawasan industri terintegrasi di Indonesia, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Batang, Jawa Tengah.

Konsep hubungan bilateral yang dianalisis dalam penelitian ini setidaknya meliputi tingkat interdependensi ekonomi, intensitas kerja sama, dan dampak proyek TCTP terhadap peningkatan investasi dan perdagangan bilateral, serta memungkinkan untuk melihat dampak yang lebih luas. Operasionalisasi dari konsep-konsep yang ada memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bagaimana TCTP memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok melalui mekanisme kerja sama internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip neoliberalisme.

Konsep interdependensi yang dianalisis dalam penelitian ini akan meliputi beberapa indikator, yaitu ketergantungan perdagangan, pemenuhan komoditi, *transfer of knowledge and technology*, dan aktivitas ekspor impor. Proyek TCTP ini dapat berlangsung tidak hanya karena salah satu pihak yang memiliki kepentingan, tetapi karena proyek ini akan menguntungkan kedua belah pihak secara seimbang. Operasionalisasi dari konsep-konsep yang ada memungkinkan analisis yang komprehensif

terhadap bagaimana TCTP merupakan bentuk interdependensi antara Indonesia dan Tiongkok didasarkan pada prinsip-prinsip neoliberalisme.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta melalui perspektif teori neoliberalisme yang menekankan pentingnya interdependensi ekonomi, institusi, serta kerja sama internasional sebagai fondasi untuk mencapai keuntungan bersama, pengembangan TCTP yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, serta transfer teknologi dianggap mampu untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi keterhubungan ekonomi serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Proyek ini tidak hanya memperluas jaringan produksi dan investasi, tetapi juga mendorong sinergi dalam pengembangan industri padat karya serta hilirisasi yang relevan dengan kepentingan kedua negara. Pola hubungan kedua negara juga menunjukkan penguatan ke arah interdependensi. Dengan demikian, meskipun TCTP masih terus dikembangkan, proyek ini mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemitraan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok melalui peningkatan interdependensi perekonomian yang terstruktur dan terencana, seperti dengan meningkatnya investasi dan ekspor-impor komoditi antara kedua negara serta Indonesia-Tiongkok yang mengandalkan keunggulan komparatif kedua kawasan industri. Hal tersebut sesuai dengan pandangan neoliberalisme terhadap interdependensi dalam kerja sama internasional yang mendorong tercapainya keuntungan bersama.

1.9 Metode Penelitian

Guna menganalisis serta menggali data, metode kualitatif diadopsi dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dirancang guna menggali pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (seperti pelaku, persepsi, motivasi, hingga tindakan) secara deskriptif dengan menggunakan beragam pendekatan ilmiah (Fiantika et al., 2022). Pendekatan kualitatif diadopsi dalam penelitian ini sebab memungkinkan peneliti untuk memahami serta menggambarkan secara komprehensif dan mendalam (*in-depth*) mengenai konteks, dinamika, serta makna dari kebijakan dan interaksi antarnegara yang tidak dapat dijelaskan melalui angka statistik belaka, melainkan juga dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana perkembangan proyek TCTP dan implikasinya terhadap hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok.

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan tipe eksplanatori digunakan untuk mendalami analisis. Penelitian eksplanatori dirancang guna menjelaskan hubungan multifaset antara gejala atau variabel serta mengidentifikasi sebab musabab suatu kejadian (Sari et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan tipe eksplanatori karena penelitian dengan tipe ini dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pengembangan proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dengan implikasinya pada hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok.

Secara spesifik, dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatori maka penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi secara deskriptif, melainkan juga dapat mengungkap beberapa faktor yang memengaruhi hubungan bilateral sebagai dampak dari realisasi proyek TCTP Indonesia-Tiongkok.

1.9.2 Jenis Data

Terkait tipe data, tipe kualitatif diandalkan dalam studi ini. Sifatnya berupa non-numerik dan digunakan untuk memahami makna, pandangan, serta dinamika sosial-politik yang berkaitan dengan adanya pengembangan proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dan implikasinya terhadap hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas fenomena yang tidak bisa ditangkap serta terdefinisi dengan data kuantitatif, misalnya motivasi dibalik suatu kebijakan, kepentingan aktor, persepsi diplomatik, serta dinamika hubungan antarnegara.

1.9.3 Sumber Data

Berkenaan dengan sumber data, tipe data sekunder dimanfaatkan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2020), Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang disampaikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, baik melalui perantara individu maupun dokumen. Pada ranah penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber sekunder mencakup berbagai dokumen dan materi tertulis yang bersifat relevan serta kredibel untuk menunjang analisis terhadap proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dan implikasinya terhadap hubungan

bilateral Indonesia–Tiongkok. Data sekunder yang diperoleh mencakup artikel ilmiah, buku, dokumen negara (MoU), laman resmi pemerintah dan kementerian, artikel berita terkini, dan berbagai literatur lainnya yang membahas mengenai perkembangan proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dan implikasinya terhadap hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut (Cahyono, 2020), *library research* ialah salah satu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai buku referensi, penelitian terdahulu yang serupa, literatur, dokumen, serta beragam laporan yang berkorelasi dengan topik yang ingin diteliti. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dan mendalam mengenai Proyek *Two Countries Twin Parks* (TCTP) dan implikasinya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok melalui kajian literatur yang telah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta berita dan publikasi dari lembaga internasional terkait.

1.9.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ialah proses yang dilakukan peneliti guna menyederhanakan serta merangkum kumpulan data hasil dari metode pengumpulan tertentu, sedangkan interpretasi data adalah upaya peneliti

untuk mendapatkan makna atas data yang telah dianalisis. Penelitian ini menggunakan *secondary data analysis*, yaitu analisis data yang berorientasi pada penggunaan informasi yang telah dihimpun oleh peneliti terdahulu guna menjawab pertanyaan riset yang sedang diteliti (Bakry, 2023). Peneliti mengadopsi model induktif sebagai kerangka yang digunakan dalam menginterpretasikan data yang diperoleh, yaitu suatu model yang dilakukan dengan mengeksplorasi fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya diintegrasikan dengan teori yang menjadi fondasi penelitian ini, yakni neoliberalisme.

1.9.6 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data dilakukan dengan melakukan pengecekan pada validitas dan reliabilitas suatu data. Validitas yaitu pengujian data yang bertujuan untuk menguji apakah data dianggap kredibel atau tidak, dengan melihat kesesuaian dengan fakta yang ditemukan di lapangan oleh informan, narasumber atau partisipan dalam riset, melalui teknik triangulasi. Adapun reliabilitas yakni pengujian yang dilakukan guna memeriksa seberapa konsisten suatu metode digunakan untuk menganalisis fenomena (Pahleviannur et al., 2022). Pengujian validitas pada studi ini mengadopsi triangulasi sebagai langkah penting dalam memperkuat keabsahan serta kredibilitas data yang diperoleh. Triangulasi mengacu pada upaya verifikasi serta validasi data yang dilakukan melalui kombinasi sumber, pendekatan, serta waktu yang bervariasi (Mekarisce, 2020). Melalui perbandingan data dari berbagai sudut pandang, peneliti

dapat meminimalkan bias serta mendapatkan perspektif yang lebih objektif atas fenomena yang dikaji. Dalam pengecekan reliabilitas data, pengujian dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses riset oleh peneliti selama melakukan penelitian.